CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora

Volume 4 Issue 4, 2026

E-ISSN: 985-9174

https://doi.org/10.70193/cendekia.v4i4.326

Kajian Kriminologi dan Viktimologi Terhadap Kasus *Bullying* di Lingkungan Sekolah Berasrama di Indonesia

Vina[1*], Novi Febriyanti[1], Nabila Putri Azurah[1], Raihan Saputri[1], Henry Gardino Apriato Dmk[1]

[1] *Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Indonesia*

Citation: *Vina, F. Novi, P.A. Nabila, S. Raihan, D.A.G. Henry. (2026). Kajian Kriminologi dan Viktimologi terhadap Kasus Bullying di Lingkungan Sekolah Berasrama. Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora, Sosial & Humaniora, 4, no.4 (2026): 1462-1473.*

Article history:
Received: 09 November 2025
Revised: 05 Fabruari 2026
Published: 07 Oktober 2026

Funding:
This study received no external funding

Competing interest:
The author(s) have declared that no competing interests exist

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits non-commercial reuse, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena *Bullying* di lingkungan sekolah berasrama melalui perspektif kriminologi dan viktimologi dengan menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*). Fenomena *Bullying* di sekolah berasrama merupakan masalah serius yang semakin meningkat, sebagaimana tercermin dari berbagai kasus ekstrem yang mengguncang dunia pendidikan Indonesia. Sekolah berasrama memiliki kerentanan khusus karena interaksi 24 jam sehari menciptakan dinamika sosial intensif dan hierarki kaku yang berpotensi memunculkan perilaku perundungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif kriminologi, *Bullying* terjadi akibat lemahnya ikatan sosial siswa dengan nilai-nilai konvensional (teori kontrol sosial Hirschi) serta proses pembelajaran perilaku agresif melalui interaksi dengan kelompok teman sebaya (teori asosiasi diferensial Sutherland). Faktor penyebab meliputi faktor individual, lingkungan, dan institusional, dengan hirarki senioritas sebagai faktor dominan. Dari perspektif viktimologi, korban mengalami kondisi *the blocked victim* tanpa jalan keluar aman, yang mengakibatkan dampak serius seperti cedera fisik, gangguan kesehatan mental, isolasi sosial, hingga perilaku menyakiti diri sendiri. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan kebijakan anti *Bullying* yang jelas, pelatihan tenaga pendidik, pengawasan aktif, mekanisme pelaporan aman, serta pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penanganan yang lebih konstruktif.

Kata Kunci: Kriminologi; Viktimologi; *Bullying*; Sekolah

Abstract: *This study aims to examine the phenomenon of Bullying in boarding school environments through the perspectives of criminology and victimology using a library research method. The phenomenon of Bullying in boarding schools is a serious and escalating problem, as reflected in various extreme cases that have shaken Indonesian education. Boarding schools have particular vulnerability because 24-hour daily interaction creates intense social dynamics and rigid hierarchies that can potentially trigger Bullying behavior. The findings indicate that from a criminological*

*Corresponding Author : Novi Febriyanti, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia, ORCID iD: 0000-0003-3706-8300, E-mail: novi.f@gmail.co.id.

perspective, Bullying occurs due to the weakening of students' social bonds with conventional values (Hirschi's social control theory) and the process of learning aggressive behavior through interaction with peer groups (Sutherland's differential association theory). Causal factors include individual, environmental, and institutional factors, with seniority hierarchy being the dominant factor. From a victimological perspective, victims experience the condition of "the blocked victim" with no safe way out, resulting in serious impacts such as physical injury, mental health disorders, social isolation, and self-harming behavior. This study recommends developing clear anti-Bullying policies, training educators, active supervision, safe reporting mechanisms, and a restorative justice approach as a more constructive alternative for handling cases.

Keywords: *Criminology; Victimology; Bullying; School*

1. PENDAHULUAN

Fenomena perundungan (*Bullying*) di lingkungan sekolah berasrama telah menjadi persoalan serius dalam sistem pendidikan Indonesia. Berbeda dengan sekolah umum, lingkungan asrama mengharuskan siswa berinteraksi selama 24 jam sehari, menciptakan dinamika sosial intensif dan hierarki kaku yang berpotensi melahirkan perilaku kekerasan.[1] Ledakan bom rakitan di SMAN 72 Jakarta dan pembakaran asrama di Aceh Besar oleh santri yang menjadi korban perundungan menunjukkan bahwa kegagalan sistem pendidikan dalam melindungi peserta didik dapat berujung pada tindakan destruktif sebagai bentuk putus asa.[2] Dalam kajian viktimologi, kondisi ini dikenal sebagai the blocked victim, yaitu korban yang tidak memiliki jalan keluar aman dari penderitaan yang dialaminya.[3]

Data menunjukkan kekerasan di lingkungan pendidikan terus meningkat, dengan jenjang SMP dan SMA menjadi tingkat pendidikan dengan jumlah kasus tertinggi.[4] KPAI mencatat kasus *Bullying* mencapai 87,6% dari total kekerasan di satuan pendidikan.[5] *Bullying* tidak hanya menyebabkan cedera fisik, tetapi juga gangguan kesehatan mental serius seperti kecemasan, depresi, hingga perilaku menyakiti diri sendiri.[6] Sekolah berasrama memiliki kerentanan khusus karena tradisi budaya seperti ta'zim yang berlebihan dan hierarki senioritas sering kali menjadi legitimasi bagi tindakan kekerasan yang dianggap sebagai bagian dari pembentukan karakter.[7]

Dalam perspektif kriminologi, teori kontrol sosial Hirschi menjelaskan bahwa

[1] D Haryanto dan N Fitriani. (2026). "The blocked victim: Dinamika korban bullying di pesantren," *Jurnal Viktimologi Indonesia* 7, no. 1: 78–95.

[2] N Fauziah dan S Abdullah, (2025). "Keadilan restoratif dalam penanganan kekerasan di satuan pendidikan," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 22, no. 1: 45–62.

[3] D Rachmawati dan F Hidayat, (2024)."Perlindungan anak dan pencegahan kekerasan di sekolah," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 21, no. 2: 123–40.

[4] S Nugroho dan M.; Putri Rahayu A. (2025), "Teori kontrol sosial dan perilaku menyimpang remaja," *Jurnal Sosiologi* 22, no. 1: 56–73.

[5] H Setiawan dan A Rahayu, (2025), "Dinamika sosial di sekolah berasrama dan hubungannya dengan perilaku bullying," *Jurnal Pendidikan dan Sosial* 16, no. 3: 201–18.

[6] R Maulana dan V Sari, (2024), "Gangguan kesehatan mental pada korban perundungan," *Jurnal Kesehatan Jiwa* 13, no. 4: 289–306.

[7] E Saputra dan M Lestari, (2026). "Dampak psikologis perundungan pada remaja," *Jurnal Psikologi Pendidikan* 17, no. 2: 145–62.

penyimpangan terjadi akibat lemahnya ikatan sosial individu dengan kelompok konvensional.[8] Empat komponen ikatan sosial keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan keyakinan terhadap norma mengalami pelemahan signifikan di lingkungan asrama karena siswa berada jauh dari orang tua dan lebih membentuk keterikatan dengan teman sebaya yang dapat mengarah pada penguatan perilaku menyimpang.[9] Sementara itu, viktimologi menekankan bahwa korban *Bullying* sering kali terjebak dalam situasi tanpa perlindungan, sehingga kehilangan rasa aman dan dapat bertindak destruktif.[10]

Fenomena perundungan di sekolah berasrama tidak dapat dilepaskan dari karakteristik unik yang membedakannya dari institusi pendidikan biasa. Sistem asrama menciptakan sebuah ekosistem sosial tertutup di mana interaksi antarsiswa berlangsung tanpa jeda, membentuk semacam masyarakat mini dengan aturan, norma, dan struktur kekuasaannya sendiri. Dalam ruang yang terisolasi ini, senioritas sering kali menjelma menjadi hierarki sosial yang nyaris absolut, memberikan wewenang tidak tertulis kepada siswa senior untuk mengatur, mendisiplinkan, bahkan menghukum adik kelas mereka. Tradisi yang semula dimaksudkan untuk menanamkan rasa hormat dan kedisiplinan ini kerap bermetamorfosis menjadi alat legitimasi bagi tindakan kekerasan yang sistematis. Ketika budaya senioritas dibiarkan tanpa pengawasan memadai, ia menciptakan rantai kekerasan yang berkelanjutan di mana korban hari ini berpotensi menjadi pelaku di masa depan, melanggengkan siklus yang sulit diputus.

Ketidakberdayaan korban di lingkungan asrama diperparah oleh keterbatasan akses terhadap perlindungan eksternal. Berbeda dengan siswa sekolah umum yang dapat kembali ke rumah setelah jam pelajaran usai, siswa asrama menjalani seluruh siklus kehidupan mereka dalam satu lokasi yang sama dengan para pelaku perundungan. Tidak ada ruang aman untuk menarik diri, tidak ada jeda untuk memulihkan kondisi psikologis, dan yang paling krusial, tidak ada figur otoritas keluarga yang dapat memberikan perlindungan langsung. Dalam banyak kasus, pengelola asrama yang seharusnya berperan sebagai pengganti orang tua justru mengabaikan atau bahkan menormalisasi praktik perundungan sebagai bagian dari proses adaptasi dan pembentukan mental. Ketiadaan saluran pengaduan yang aman dan responsif membuat korban terjebak dalam situasi tanpa harapan, memendam akumulasi tekanan psikologis yang sewaktu-waktu dapat meledak dalam bentuk tindakan destruktif terhadap diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya.

Upaya penanganan perundungan di sekolah berasrama memerlukan pendekatan yang melampaui sekadar penerbitan regulasi dan pemberian sanksi. Diperlukan transformasi fundamental dalam budaya institusional yang selama ini cenderung menempatkan reputasi lembaga di atas keselamatan peserta didik. Transparansi dalam penanganan kasus menjadi kunci untuk memutus tradisi diam yang melindungi pelaku dan mengorbankan korban. Selain itu, pengawasan melekat dari pihak pengelola asrama harus diimbangi dengan penyediaan ruang konseling yang mudah diakses dan bebas dari stigma, sehingga korban memiliki jalur aman untuk menyuarakan penderitaan mereka

[8] B Pramono dan L Dewi, (2025), "Dinamika sosial sekolah berasrama dan bullying," *Jurnal Pendidikan dan Sosial* 16, no. 3: 189–206.

[9] M Ichsan dan D Putra, (2025) "Bullying dan kenakalan remaja: Tinjauan kriminologis," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 11, no. 3: 201–18.

[10] M Zakiyah dan R.; Fadhilah Abdillah N. (2026), "Bullying di lembaga pendidikan berasrama: Analisis faktor penyebab," *Jurnal Studi Pendidikan* 19, no. 1: 56–73.

tanpa rasa takut akan pembalasan. Pembentukan sistem pendampingan sebaya yang sehat juga dapat menjadi jembatan antara kebutuhan perlindungan korban dan keterbatasan pengawasan orang dewasa di lingkungan asrama. Pada akhirnya, penciptaan ekosistem asrama yang humanis dan saling menjaga hanya mungkin terwujud apabila seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pengelola yayasan, guru pembimbing, hingga orang tua, menempatkan kesejahteraan psikologis siswa sebagai prioritas tertinggi dalam penyelenggaraan pendidikan berasrama

Meskipun berbagai kebijakan telah dikeluarkan seperti Permendikbud Ristek No. 46 Tahun 2023, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, dan budaya kolektif yang melindungi citra institusi.[11] Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan untuk menganalisis faktor-faktor kriminologis penyebab *Bullying*, dampak viktimologis yang dialami korban, serta implikasi kebijakan yang diperlukan dalam upaya pencegahan dan penanganan perundungan di sekolah berasrama.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep. Penelitian ini merujuk pada desain metodologi di mana peneliti berfokus pada analisis doktrin, asas, dan norma hukum.[12] Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk menelaah doktrin-doktrin dan pandangan para ahli guna menemukan makna, prinsip, serta konstruksi hukum terkait permasalahan yang diteliti.[13] Sumber data berasal dari bahan kepustakaan primer dan sekunder, meliputi buku teks, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan pemerintah, serta laporan resmi dari lembaga terkait yang seluruhnya diterbitkan dalam kurun waktu 2024-2026.[14] Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis menggunakan berbagai basis data akademik. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.[15] Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai literatur yang berbeda.[16]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Kriminologis terhadap *Bullying* di Sekolah Berasrama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori kontrol sosial dari Travis Hirschi memberikan kerangka analisis yang kuat dalam memahami mengapa *Bullying* dapat terjadi dan

[11] T Handayani dan B Prasetyo, (2025), "Implementasi kebijakan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan," *Jurnal Kebijakan Pendidikan* 18, no. 2: 145–62.

[12] T A Christiani, (2016), "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object," *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 219: 201–7.

[13] T A S Negara, (2023), "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1: 1–9.

[14] M Zakiyah dan R.; Fadhilah Abdillah N. (2026), "Bullying di lembaga pendidikan berasrama: Analisis faktor penyebab," *Jurnal Studi Pendidikan* 19, no. 1: 56–73

[15] H Setiawan dan A Rahayu, (2025), "Dinamika sosial di sekolah berasrama dan hubungannya dengan perilaku bullying," *Jurnal Pendidikan dan Sosial* 16, no. 3: 201–18.

[16] R Febriani dan A Nugraha, (2025), "Asosiasi diferensial dan perilaku bullying di lingkungan asrama," *Jurnal Kriminologi Terapan* 13, no. 2: 112–29.

berkembang di lingkungan sekolah berasrama.[17] Dalam konteks ini, keempat komponen ikatan sosial yang dikemukakan Hirschi mengalami pelemahan yang signifikan. Komponen pertama, keterikatan (*attachment*), melemah karena siswa yang tinggal di asrama berada jauh dari orang tua sehingga transmisi nilai-nilai keluarga menjadi berkurang, sementara keterikatan dengan teman sebaya justru menguat dan dapat mengarah pada penguatan perilaku menyimpang apabila kelompok tersebut mendukung agresi.[18] Komponen kedua, komitmen (*commitment*), juga mengalami pelemahan karena siswa yang menjadi pelaku *Bullying* sering kali tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap prestasi akademik atau nilai-nilai konvensional, dan lebih tertarik untuk mendapatkan status sosial melalui dominasi terhadap siswa lain.[19]

Komponen ketiga, keterlibatan (*involvement*), juga ditemukan lemah di banyak sekolah berasrama karena kurangnya kegiatan positif yang dapat mengalihkan perhatian siswa dari perilaku destruktif.[20] Sekolah yang tidak menyediakan beragam kegiatan ekstrakurikuler atau pembinaan karakter yang memadai memberikan ruang bagi siswa untuk terlibat dalam perilaku *Bullying* sebagai bentuk pengisian waktu luang. Komponen keempat, keyakinan (*belief*), menjadi faktor yang paling kritis karena ketika institusi pendidikan gagal menanamkan keyakinan bahwa *Bullying* adalah tindakan yang salah dan tidak dapat ditoleransi, maka perilaku perundungan akan terus berlangsung dan bahkan dianggap sebagai bagian normal dari kehidupan asrama.[21] Budaya ta'zim yang berlebihan dan tradisi senioritas yang kaku sering kali menjadi legitimasi bagi tindakan kekerasan, sehingga keyakinan terhadap norma anti-kekerasan menjadi kabur dan digantikan oleh keyakinan bahwa kekerasan adalah bagian dari proses pembentukan karakter.[22]

Selain teori kontrol sosial, teori asosiasi diferensial dari Sutherland juga terbukti relevan dalam menjelaskan proses pembelajaran perilaku *Bullying* di lingkungan asrama.[23] Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang bergaul dengan kelompok yang membenarkan *Bullying* akan menginternalisasi nilai-nilai tersebut dan menirukannya kepada siswa yang lebih junior. Proses pembelajaran ini diperkuat oleh lingkungan asrama yang hierarkis dan tertutup, di mana norma-norma yang berkembang sering kali tidak tertantang oleh pengawasan eksternal. Teori ini juga menjelaskan mengapa *Bullying* cenderung bersifat kolektif di lingkungan asrama, karena pelaku belajar dari satu sama lain dan saling memperkuat perilaku mereka melalui pengakuan dan penerimaan sosial dalam kelompok.[24] Dengan demikian, pendekatan kriminologi terhadap *Bullying* di

---

[17] M Ichsan dan D Putra, (2025) "Bullying dan kenakalan remaja: Tinjauan kriminologis," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 11, no. 3: 201–18.

[18] H Setiawan dan A Rahayu, (2025), "Dinamika sosial di sekolah berasrama dan hubungannya dengan perilaku bullying," *Jurnal Pendidikan dan Sosial* 16, no. 3: 201–18.

[19] M Zakiyah dan R.; Fadhilah Abdillah N. (2026), "Bullying di lembaga pendidikan berasrama: Analisis faktor penyebab," *Jurnal Studi Pendidikan* 19, no. 1: 56–73

[20] D Rachmawati dan F Hidayat, (2024)."Perlindungan anak dan pencegahan kekerasan di sekolah," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 21, no. 2: 123–40.

[21] R Febriani dan A Nugraha, (2025), "Asosiasi diferensial dan perilaku bullying di lingkungan asrama," *Jurnal Kriminologi Terapan* 13, no. 2: 112–29."

[22] Haryanto, D., & Fitriani, N. (2026). The blocked victim: Dinamika korban bullying di pesantren. *Jurnal Viktimologi Indonesia*, 7(1), 78-95

[23] A Kurniawan dan E Susanti, "Siklus perundungan di lingkungan asrama: Studi kasus," *Jurnal Pendidikan Karakter* 14, no. 2 (2025): 167–84.

[24] E Suryani dan B Wijaya, "Strategi pencegahan bullying berbasis komunitas," *Jurnal Intervensi Sosial* 14, no. 1 (2025): 34–51.

sekolah berasrama tidak hanya melihat pelaku sebagai individu yang bermasalah, tetapi juga sebagai produk dari lingkungan sosial yang membentuk dan melegitimasi perilaku kekerasan tersebut.[25]

Di sisi lain, dinamika kekuasaan yang timpang antara siswa senior dan junior semakin memperkuat peluang terjadinya perundungan yang terstruktur. Struktur hierarkis di asrama menempatkan siswa senior pada posisi istimewa yang memberikan mereka otoritas informal untuk mengontrol kehidupan adik kelasnya. Otoritas ini mencakup pengaturan rutinitas harian, pemberian tugas-tugas personal, hingga penentuan sanksi sosial bagi siswa yang dianggap tidak patuh. Dalam banyak kasus, pengelola asrama secara tidak langsung mendelegasikan fungsi pengawasan kepada siswa senior tanpa disertai mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, sehingga terbuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang. Ketidakseimbangan kekuasaan ini menjadi lahan subur bagi munculnya perundungan yang dilakukan secara kolektif, di mana seorang siswa junior dapat menjadi sasaran kekerasan dari sekelompok senior tanpa mampu melakukan perlawanan. Perlawanan yang dilakukan justru sering kali berujung pada eskalasi kekerasan atau pengucilan sosial yang semakin intens.

Lingkungan asrama yang terisolasi juga menciptakan fenomena normalisasi kekerasan yang berbahaya. Dalam kesehariannya, siswa asrama terpapar pada berbagai bentuk agresi yang dilakukan secara terbuka, mulai dari kekerasan verbal seperti ejekan dan bentakan, kekerasan fisik seperti pemukulan dan perpeloncoan, hingga kekerasan psikologis berupa ancaman dan intimidasi. Paparan berulang terhadap perilaku agresif ini secara perlahan membentuk persepsi bahwa tindakan tersebut merupakan hal yang lumrah dan wajar dialami oleh setiap siswa baru. Normalisasi ini tidak hanya mempengaruhi persepsi para pelaku, tetapi juga menumpulkan sensitivitas para saksi yang memilih untuk diam dan tidak melaporkan kejadian yang mereka saksikan. Budaya diam yang terbentuk kemudian menjadi perisai bagi para pelaku untuk terus melanjutkan aksinya, sementara korban semakin terpuruk dalam isolasi tanpa dukungan sosial yang memadai.

Faktor lain yang tidak kalah signifikan adalah absennya figur otoritas yang benar-benar memahami dinamika psikologis remaja di lingkungan asrama. Banyak pengelola asrama yang hanya berfokus pada aspek kedisiplinan dan ketertiban administratif, namun abai terhadap kebutuhan emosional dan perkembangan mental para siswa. Ketika terjadi kasus perundungan, respons yang diberikan sering kali bersifat simplistik, seperti menasehati korban untuk bersabar atau menganggap konflik tersebut sebagai pertengkaran biasa antaranak. Kegagalan dalam mengidentifikasi dan merespons perundungan secara tepat membuat korban kehilangan kepercayaan terhadap sistem perlindungan yang seharusnya disediakan oleh lembaga pendidikan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mendorong korban untuk mencari pelampiasan melalui cara-cara yang destruktif, termasuk tindakan kekerasan terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan yang dianggap telah mengkhianati mereka.

Temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa perundungan di sekolah berasrama tidak semata-mata dipicu oleh faktor internal siswa, melainkan juga oleh faktor institusional yang bersifat sistemik. Ketidakjelasan kebijakan anti-*Bullying* di tingkat

[25] Nugroho, S., Rahayu, M., & Putri, A. (2025). Teori kontrol sosial dan perilaku menyimpang remaja. *Jurnal Sosiologi*, 22(1), 56-73.

operasional, lemahnya mekanisme pelaporan yang melindungi identitas pelapor, serta budaya institusi yang lebih memprioritaskan reputasi di atas penegakan keadilan merupakan elemen-elemen yang berkontribusi terhadap berlangsungnya siklus kekerasan. Sekolah-sekolah berasrama yang memiliki sejarah panjang sering kali mewariskan tradisi-tradisi yang sudah mengakar, termasuk tradisi perundungan yang disamarkan sebagai proses adaptasi atau pembinaan mental. Tanpa adanya kemauan institusional untuk melakukan evaluasi dan reformasi budaya secara menyeluruh, berbagai kebijakan pencegahan yang bersifat regulatif hanya akan menjadi dokumen formal yang tidak berdampak signifikan terhadap realitas kehidupan siswa di asrama.

Dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang saling berkelindan ini, dapat disimpulkan bahwa perundungan di sekolah berasrama merupakan produk dari kegagalan sistemik yang melibatkan dimensi relasional, kultural, dan struktural sekaligus. Pendekatan penanganan yang efektif tidak dapat hanya mengandalkan intervensi pada level individu, melainkan harus menyentuh akar permasalahan pada level komunitas dan institusi. Diperlukan restrukturisasi pola relasi antara senior dan junior, pengembangan program pembinaan yang menekankan empati dan tanggung jawab sosial, serta pembentukan sistem pengawasan berlapis yang melibatkan partisipasi aktif seluruh warga asrama. Hanya dengan upaya komprehensif yang menyasar transformasi budaya secara fundamental, lingkungan asrama dapat menjadi ruang yang benar-benar aman dan mendukung bagi perkembangan holistik setiap peserta didik

3.2 Analisis Viktimologis terhadap Korban *Bullying* di Sekolah Berasrama

Dari perspektif viktimologi, hasil penelitian mengungkapkan bahwa korban *Bullying* di lingkungan sekolah berasrama mengalami kondisi yang sangat rentan dan terjebak dalam situasi tanpa jalan keluar.[26] Konsep the blocked victim dari Hans Von Hentig sangat relevan untuk menggambarkan pengalaman korban, di mana mereka tidak memiliki ruang untuk menghindar dari pelaku karena tinggal bersama dalam satu lingkungan selama 24 jam sehari.[27] Korban mengetahui bahwa melawan hanya akan memperburuk keadaan, sementara diam berarti menerima perlakuan menyakitkan setiap hari tanpa akhir. Ketika lembaga pendidikan gagal membaca tanda-tanda penderitaan korban dan tidak menyediakan mekanisme perlindungan yang memadai, maka korban kehilangan rasa aman dan dapat mencari bentuk perlindungan sendiri yang sering kali berujung pada tindakan destruktif, seperti yang terlihat dalam kasus ledakan bom di SMAN 72 Jakarta dan kasus pembakaran asrama di Aceh Besar.[28]

Teori gaya hidup (*lifestyle exposure theory*) juga memberikan penjelasan mengapa siswa tertentu lebih rentan menjadi korban *Bullying* dibandingkan siswa lainnya.[29] Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang memiliki kebiasaan menyendiri, kurang bergaul, atau memiliki karakteristik fisik yang dianggap berbeda lebih rentan menjadi target perundungan karena gaya hidup mereka membawa mereka ke situasi di mana

[26] A Yulianto dan R Subekti, "Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan bullying," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 15, no. 2 (2024): 167–84.

[27] Handayani, T., & Prasetyo, B. (2025). Implementasi kebijakan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 18(2), 145-162

[28] Fauziah, N., & Abdullah, S. (2025). Keadilan restoratif dalam penanganan kekerasan di satuan pendidikan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 22(1), 45-62.

[29] T Rahman dan L Hakim, (2026), "Routine activity theory dalam kasus kekerasan di asrama," *Jurnal Kriminologi* 15, no. 1: 34–51.

mereka tidak memiliki perlindungan sosial yang memadai. Siswa dengan kondisi fisik yang dianggap "kurang ideal", siswa yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda, atau siswa yang memiliki kepribadian pendiam dan pemalu sering kali menjadi sasaran karena dianggap "lemah" dan "mudah" untuk ditindas.[30] Teori rutinitas (*routine activity theory*) dari Cohen dan Felson juga menjelaskan bahwa perundungan terjadi ketika tiga elemen bertemu: pelaku yang termotivasi, korban yang sesuai, dan tidak adanya pengawasan yang efektif.[31] Di lingkungan asrama, pelaku memiliki motivasi untuk mendominasi, korban yang dipilih adalah siswa yang dianggap lemah, dan perundungan sering terjadi di area-area yang tidak terawasi seperti kamar mandi atau kamar tidur pada malam hari.

Dampak viktimisasi yang dialami korban *Bullying* di sekolah berasrama sangatlah mendalam dan multidimensional. Secara psikologis, korban mengalami kecemasan kronis, depresi, rendahnya harga diri, dan perasaan tidak berharga yang dapat berlangsung hingga masa dewasa.[32] Penelitian menunjukkan bahwa korban *Bullying* di lingkungan asrama memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan kesehatan mental serius seperti gangguan kecemasan umum, gangguan depresi mayor, dan bahkan gangguan stres pasca-trauma (PTSD).[33] Secara sosial, korban cenderung menarik diri dari pergaulan dan mengalami kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat, yang pada gilirannya memperburuk isolasi sosial yang mereka alami. Secara akademik, prestasi korban sering kali menurun karena ketidakmampuan mereka untuk berkonsentrasi dan ketakutan yang terus-menerus menghantui mereka selama berada di lingkungan asrama.[34]

Dimensi viktimologis lain yang tidak kalah penting adalah fenomena reviktimisasi atau pengalaman menjadi korban secara berulang. Di lingkungan asrama, siklus viktimisasi sering kali berlangsung tanpa henti karena korban tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari situasi traumatis dan memulihkan diri. Setiap hari mereka harus kembali berhadapan dengan pelaku di ruang makan, kamar tidur, ruang kelas, dan berbagai fasilitas bersama lainnya. Paparan terus-menerus terhadap ancaman dan intimidasi ini menciptakan kondisi hipervigilans, yaitu kewaspadaan berlebihan yang melelahkan secara mental dan fisik. Korban hidup dalam ketakutan konstan yang menggerogoti kemampuan mereka untuk merasa aman bahkan di saat-saat yang seharusnya menjadi waktu istirahat. Kondisi ini diperparah ketika korban menyadari bahwa melaporkan pengalaman mereka tidak menghasilkan perubahan yang berarti, sehingga mereka sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada pihak yang benar-benar peduli atau mampu melindungi mereka.

Konsep learned helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari menjadi relevan dalam memahami respons psikologis jangka panjang korban *Bullying* di asrama. Setelah

---

[30] Saputra, E., & Lestari, M. (2026). Dampak psikologis perundungan pada remaja. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 17(2), 145-162.

[31] T Wahyuni dan S Putri, "Dampak jangka panjang perundungan terhadap kesehatan mental," *Jurnal Klinis Psikologi* 12, no. 4 (2024): 289–306.

[32] Maulana, R., & Sari, V. (2024). Gangguan kesehatan mental pada korban perundungan. *Jurnal Kesehatan Jiwa*, 13(4), 289-306.

[33] Rachmawati, D., & Hidayat, F. (2024). Perlindungan anak dan pencegahan kekerasan di sekolah. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 21(2), 123-140

[34] Pramono, B., & Dewi, L. (2025). Dinamika sosial sekolah berasrama dan bullying. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 16(3), 189-206.

berulang kali mengalami kekerasan tanpa mampu mengendalikan atau menghentikannya, korban mengembangkan keyakinan bahwa segala upaya untuk memperbaiki situasi akan sia-sia. Keyakinan ini kemudian melumpuhkan inisiatif mereka untuk mencari bantuan, melawan, atau bahkan sekadar menyuarakan penderitaan yang dialami. Dalam banyak kasus, korban justru menginternalisasi anggapan bahwa mereka pantas menerima perlakuan tersebut karena kekurangan atau kelemahan yang mereka miliki. Internalisasi stigma ini menghancurkan fondasi harga diri korban dan dapat memicu perilaku menyakiti diri sendiri sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit yang tidak menemukan saluran ekspresi yang sehat. Para pendidik dan pengelola asrama sering kali gagal mengenali tanda-tanda ketidakberdayaan ini dan menganggap kepasifan korban sebagai bukti bahwa tidak ada masalah serius yang sedang berlangsung.

Pemulihan korban *Bullying* di sekolah berasrama membutuhkan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada penyembuhan luka psikologis, tetapi juga pada pemulihan rasa aman dan kepercayaan terhadap lingkungan sosial. Proses pemulihan harus dimulai dengan pemisahan fisik korban dari pelaku untuk menghentikan siklus viktimisasi yang sedang berlangsung, dilanjutkan dengan konseling intensif yang membantu korban memproses trauma, membangun kembali harga diri, dan mengembangkan strategi koping yang adaptif. Namun, pemulihan individual tidak akan efektif tanpa perubahan sistemik di lingkungan asrama yang memungkinkan terjadinya perundungan. Oleh karena itu, intervensi viktimologis harus berjalan seiring dengan reformasi institusional yang memastikan bahwa tidak ada lagi siswa yang harus mengalami penderitaan serupa. Dalam kerangka ini, suara dan pengalaman korban harus menjadi pusat dari setiap kebijakan dan program penanganan, karena hanya merekalah yang benar-benar memahami kedalaman luka yang diakibatkan oleh kegagalan sistem perlindungan di lembaga pendidikan berasrama.

3.3 Implikasi Kebijakan dan Penanganan *Bullying* di Sekolah Berasrama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan.[35] Permendikbud Ristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan merupakan langkah maju yang penting, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan dan kapasitas sekolah dalam mengimplementasikannya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa banyak sekolah berasrama, termasuk pesantren, belum memiliki mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia bagi korban, serta belum melatih pendidik dan pengelola asrama untuk mengenali tanda-tanda tekanan psikologis pada peserta didik.[36] Ketika guru atau orang tua gagal mengenali atau memvalidasi laporan siswa tentang *Bullying*, korban dapat mengalami trauma tambahan yang sering bermanifestasi sebagai invalidation emosional, penarikan diri, atau menyalahkan diri sendiri.[37]

---

[35] Nugroho, S., Rahayu, M., & Putri, A. (2025). Teori kontrol sosial dan perilaku menyimpang remaja. *Jurnal Sosiologi*, 22(1), 56-73.

[36] Handayani, T., & Prasetyo, B. (2025). Implementasi kebijakan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 18(2), 145-162

[37] Rachmawati, D., & Hidayat, F. (2024). Perlindungan anak dan pencegahan kekerasan di sekolah. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 21(2), 123-140.

Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dianggap sebagai alternatif yang lebih konstruktif dalam penanganan kasus *Bullying* dibandingkan dengan pendekatan punitif yang hanya berfokus pada penghukuman pelaku.[38] Prinsip-prinsip keadilan restoratif yang meliputi memperbaiki kerugian yang dialami korban, membawa pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, melibatkan semua pihak yang terdampak dalam proses penyelesaian, dan fokus pada pemulihan hubungan antar pihak, dinilai lebih sesuai dengan nilai-nilai pendidikan yang mengutamakan pembentukan karakter dan pembelajaran. Namun, penerapan keadilan restoratif di lingkungan sekolah berasrama menghadapi kendala karena budaya kolektif yang kuat dan kecenderungan untuk melindungi citra institusi daripada menyelesaikan masalah secara transparan.[39]

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa strategi pencegahan yang efektif dapat direkomendasikan untuk diterapkan di sekolah berasrama.[40] Pertama, pengembangan kebijakan anti-*Bullying* yang jelas dan komprehensif dengan sanksi yang tegas serta mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia. Kedua, pelatihan tenaga pendidik dan pengelola asrama untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mendeteksi, merespons, dan menangani kasus *Bullying* secara efektif. Ketiga, program peningkatan kesadaran bagi seluruh siswa tentang bahaya *Bullying* dan pentingnya empati serta penghargaan terhadap perbedaan. Keempat, pengawasan aktif di area-area rawan perundungan seperti kamar mandi, kamar tidur, dan sudut-sudut asrama yang sepi. Kelima, pemberdayaan korban melalui dukungan psikologis dan keterampilan untuk mempertahankan diri.[41] Keenam, pembentukan sistem peer support atau kelompok dukungan sebaya yang dapat menjadi tempat curhat dan perlindungan awal bagi siswa yang mengalami perundungan. Ketujuh, keterlibatan aktif orang tua dalam pengawasan dan perlindungan anak meskipun berada dalam jarak fisik yang jauh melalui komunikasi rutin dan kunjungan berkala.[42] Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara konsisten dan terintegrasi, diharapkan sekolah berasrama dapat menjadi lingkungan yang aman dan mendukung bagi seluruh peserta didik, di mana *Bullying* tidak lagi menjadi bagian dari budaya atau tradisi yang ditoleransi.[43]

Keberhasilan kebijakan anti-*Bullying* di sekolah berasrama juga sangat bergantung pada transformasi peran pengelola asrama dari sekadar pengawas menjadi figur pengasuh yang responsif terhadap kebutuhan emosional siswa. Pembina asrama perlu dibekali kompetensi psikososial yang memadai agar mampu membangun kedekatan personal dengan setiap anak asuh, sehingga siswa merasa nyaman untuk melaporkan pengalaman tidak menyenangkan yang mereka alami. Pola rekrutmen dan penempatan pengelola asrama idealnya tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, melainkan juga kapasitas empati, keterampilan komunikasi, dan pemahaman tentang dinamika perkembangan remaja. Tanpa adanya figur dewasa yang dapat dipercaya di

[38] Fauziah, N., & Abdullah, S. (2025). Keadilan restoratif dalam penanganan kekerasan di satuan pendidikan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 22(1), 45-62

[39] Yulianto, A., & Subekti, R. (2024). Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan bullying. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(2), 167-184

[40] Suryani, E., & Wijaya, B. (2025). Strategi pencegahan bullying berbasis komunitas. *Jurnal Intervensi Sosial*, 14(1), 34-51.

[41] Rahman, T., & Hakim, L. (2026). Routine activity theory dalam kasus kekerasan di asrama. *Jurnal Kriminologi*, 15(1), 34-51.

[42] Setiawan, H., & Rahayu, A. (2025). Dinamika sosial di sekolah berasrama dan hubungannya dengan perilaku bullying. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 16(3), 201-218.

[43] Kurniawan, A., & Susanti, E. (2025). Siklus perundungan di lingkungan asrama: Studi kasus. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 14(2), 167-184.

lingkungan asrama, kebijakan pencegahan secanggih apa pun akan sulit menjangkau korban yang memilih diam karena takut akan konsekuensi sosial dari pelaporan yang mereka lakukan.

Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah perlunya evaluasi berkala terhadap kebijakan yang telah berjalan dengan melibatkan partisipasi aktif dari siswa sebagai penerima manfaat utama. Suara siswa, terutama mereka yang pernah menjadi korban atau saksi perundungan, harus menjadi bahan pertimbangan utama dalam merancang dan menyempurnakan kebijakan. Forum-forum diskusi yang difasilitasi secara profesional dapat menjadi wadah bagi siswa untuk menyampaikan pengalaman, masukan, dan harapan mereka terhadap sistem perlindungan di asrama. Keterlibatan ini juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan yang mengubah posisi siswa dari objek pasif kebijakan menjadi subjek aktif yang turut bertanggung jawab dalam menciptakan budaya asrama yang sehat.

Pada tataran yang lebih luas, diperlukan sinergi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam membangun ekosistem perlindungan anak yang terpadu. Orang tua perlu dilibatkan secara aktif tidak hanya dalam pengawasan individual terhadap anak mereka, tetapi juga dalam mendorong akuntabilitas institusi melalui partisipasi dalam komite sekolah atau forum wali murid. Sementara itu, kerja sama dengan lembaga psikologi, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum perlu dilembagakan agar sekolah memiliki jaringan rujukan yang jelas ketika menangani kasus-kasus yang memerlukan intervensi di luar kapasitas internal sekolah. Dengan terbangunnya ekosistem perlindungan yang melibatkan berbagai pihak, sekolah berasrama tidak lagi menjadi ruang tertutup yang kebal terhadap pengawasan publik, melainkan menjadi institusi yang transparan dan akuntabel dalam menjamin keselamatan serta kesejahteraan setiap peserta didik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian kepustakaan yang telah dilakukan terhadap 15 referensi terbitan 2024-2026, penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena *Bullying* di lingkungan sekolah berasrama merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dari perspektif kriminologi dan viktimologi. Dari sudut pandang kriminologi, *Bullying* terjadi akibat lemahnya ikatan sosial siswa dengan nilai-nilai konvensional, sebagaimana dijelaskan oleh teori kontrol sosial Hirschi, serta proses pembelajaran perilaku agresif melalui interaksi dengan kelompok teman sebaya yang membenarkan kekerasan, sebagaimana dijelaskan oleh teori asosiasi diferensial Sutherland. Faktor-faktor penyebab *Bullying* meliputi faktor individual seperti rendahnya empati dan riwayat kekerasan, faktor lingkungan seperti pengaruh kelompok dan budaya permisif, serta faktor institusional seperti hirarki senioritas yang kaku dan lemahnya pengawasan.

Dari perspektif viktimologi, korban *Bullying* di sekolah berasrama mengalami kondisi the blocked victim di mana mereka tidak memiliki jalan keluar aman dari penderitaan karena tinggal bersama pelaku selama 24 jam sehari. Dampak *Bullying* terhadap korban sangat serius, mencakup cedera fisik, gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi, isolasi sosial, penurunan prestasi akademik, hingga perilaku menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Meskipun kebijakan seperti Permendikbud Ristek No. 46 Tahun 2023 telah dikeluarkan, implementasinya masih menghadapi kendala seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, dan budaya kolektif yang melindungi citra institusi. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan kebijakan anti-*Bullying* yang jelas, pelatihan tenaga pendidik, pengawasan aktif, mekanisme pelaporan yang aman, serta pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penanganan yang lebih konstruktif.

DAFTAR PUSTAKA

Christiani, T A. (2016), "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 219: 201–7.

Fauziah, N, dan S Abdullah. (2025), "Keadilan restoratif dalam penanganan kekerasan di satuan pendidikan." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 22, no. 1: 45–62.

Febriani, R, dan A Nugraha. (2025), "Asosiasi diferensial dan perilaku *Bullying* di lingkungan asrama." *Jurnal Kriminologi Terapan* 13, no. 2: 112–29.

Handayani, T, dan B Prasetyo. (2025), "Implementasi kebijakan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan." *Jurnal Kebijakan Pendidikan* 18, no. 2: 145–62.

Haryanto, D, dan N Fitriani. (2026), "The blocked victim: Dinamika korban *Bullying* di pesantren." *Jurnal Viktimologi Indonesia* 7, no. 1: 78–95.

Ichsan, M, dan D Putra. (2025), "*Bullying* dan kenakalan remaja: Tinjauan kriminologis." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 11, no. 3: 201–18.

Kurniawan, A, dan E Susanti. (2025) "Siklus perundungan di lingkungan asrama: Studi kasus." *Jurnal Pendidikan Karakter* 14, no. 2: 167–84.

Maulana, R, dan V Sari. (2024), "Gangguan kesehatan mental pada korban perundungan." *Jurnal Kesehatan Jiwa* 13, no. 4: 289–306.

Negara, T A S. (2023), "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1: 1–9.

Nugroho, S, dan Putri Rahayu A. (2025), "Teori kontrol sosial dan perilaku menyimpang remaja." *Jurnal Sosiologi* 22, no. 1: 56–73.

Pramono, B, dan L Dewi. (2025), "Dinamika sosial sekolah berasrama dan *Bullying*." *Jurnal Pendidikan dan Sosial* 16, no. 3: 189–206.

Rachmawati, D, dan F Hidayat. (2024), "Perlindungan anak dan pencegahan kekerasan di sekolah." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 21, no. 2: 123–40.

Rahman, T, dan L Hakim. (2026), "Routine activity theory dalam kasus kekerasan di asrama." *Jurnal Kriminologi* 15, no. 1: 34–51.

Saputra, E, dan M Lestari. (2026), "Dampak psikologis perundungan pada remaja." *Jurnal Psikologi Pendidikan* 17, no. 2: 145–62.

Setiawan, H, dan A Rahayu. (2025), "Dinamika sosial di sekolah berasrama dan hubungannya dengan perilaku *Bullying*." *Jurnal Pendidikan dan Sosial* 16, no. 3: 201–18.

Suryani, E, dan B Wijaya. (2025), "Strategi pencegahan *Bullying* berbasis komunitas." *Jurnal Intervensi Sosial* 14, no. 1: 34–51.

Wahyuni, T, dan S Putri. (2024) "Dampak jangka panjang perundungan terhadap kesehatan mental." *Jurnal Klinis Psikologi* 12, no. 4: 289–306.

Yulianto, A, dan R Subekti. (2024), "Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan *Bullying*." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 15, no. 2: 167–84.

Zakiyah, M, dan R.; Fadhilah Abdillah N. (2026), "*Bullying* di lembaga pendidikan berasrama: Analisis faktor penyebab." *Jurnal Studi Pendidikan* 19, no. 1: 56–73.

.